



UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SUKSESI KRATON SURAKARTA MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL

Dirga Candra Styawan¹, Deni Zein Tarsidi², Muhammad Hendri Nuryadi³

^{1,2,3}Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ¹dirgacandrastyawan@student.uns.ac.id, ²denizein@staff.uns.ac.id,

³hendri@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Konflik suksesi di Kraton Surakarta pasca-wafatnya Pakubuwana XII dan XIII mengancam kohesi budaya serta stabilitas institusi keraton. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi penyelesaian konflik tersebut melalui pendekatan kearifan lokal Jawa. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan, akar sengketa, dan relevansi nilai kultural dalam konteks kontemporer. Kerangka teoretis mengintegrasikan perspektif sosiologis yang memandang konflik sebagai gejala inheren sekaligus mekanisme fungsional pendorong transformasi sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian efektif memerlukan dua mekanisme komplementer. Pertama, dialog internal keluarga kraton yang menginternalisasi prinsip musyawarah mufakat, penghormatan pada hierarki adat, dan nilai kerukunan. Kedua, keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator kultural yang netral untuk menjamin objektivitas dan keselarasan dengan paugeran. Sinergi kedua pendekatan ini menghasilkan model resolusi yang legitimatif dan berkelanjutan. Konflik suksesi tidak lagi dipandang sebagai ancaman disintegrasi, melainkan momentum revitalisasi institusi. Penerapan strategi ini memperkuat peran Kraton Surakarta sebagai penjaga peradaban Jawa yang adaptif, sekaligus membuktikan relevansi kearifan lokal dalam manajemen konflik modern.

Kata Kunci: Konflik, Kraton, Surakarta, Kearifan, Lokal

ABSTRACT

The succession conflict at the Surakarta Palace following the deaths of Pakubuwana XII and XIII threatens cultural cohesion and institutional stability. This study aims to formulate a conflict resolution strategy through the Javanese local wisdom approach. Employing a qualitative method with literature review techniques, this research analyzes power dynamics, root causes of the dispute, and the relevance of cultural values in contemporary contexts. The theoretical framework integrates sociological perspectives that view conflict as an inherent phenomenon and a functional mechanism driving social transformation. Findings indicate that effective resolution requires two complementary mechanisms: first, internal family dialogue within the palace that internalizes the principles of consensus-based deliberation, respect for traditional hierarchy, and harmony; second, the involvement of a neutral third party as a cultural mediator to ensure objectivity and alignment with customary regulations (paugeran). The synergy of these approaches produces a legitimate and sustainable resolution model. Succession conflict is thus reframed not as a threat of disintegration, but as an opportunity for institutional revitalization. Implementing this strategy strengthens the Surakarta Palace's role as a guardian of adaptable Javanese civilization, while demonstrating the continued relevance of local wisdom in modern conflict management.

Keywords: *Conflict, Kraton, Surakarta, Wisdom, Local*

A. PENDAHULUAN

Kota Surakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang masih hidup hingga kini. Warisan seni tradisi dan tata nilai keraton menjadikan kota ini unik di Indonesia. Proses akulturasi budaya di kawasan seperti Kauman menunjukkan dinamika interaksi antara nilai tradisional dan modern yang terus berlangsung [9]. Potensi budaya tersebut tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat lokal. Keberagaman ekspresi budaya di Solo terus dipelihara melalui ritual, pendidikan, dan partisipasi warga.

Kraton Surakarta berdiri sebagai simbol tertinggi peradaban Jawa Mataram. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal penguasa, tetapi juga pusat pelestarian bahasa dan filosofi Jawa. Struktur kepemimpinan dipegang oleh seorang Pakubuwana yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan budaya. Di bawahnya terdapat bangsawan dan abdi dalem yang menjalankan fungsi kultural berdasarkan konsep *narimo ing pandum* sebagai bentuk penerimaan dan pengabdian [10]. Keberadaan kraton tetap relevan karena mampu menghubungkan masa lalu dengan dinamika masa kini dalam konteks wacana keistimewaan Surakarta [11].

Konflik suksesi pertama kali muncul secara terbuka pada tahun 2004 pasca wafatnya Pakubuwana XII. Perebutan tahta sempat membelah keluarga kraton dan menimbulkan ketegangan di masyarakat [15]. Penelitian terdahulu tentang konflik keraton di Indonesia cenderung berfokus pada analisis historis silsilah tahta atau kajian yuridis formal tentang legalitas pengangkatan raja. Beberapa studi juga telah membahas mediasi berbasis kearifan lokal yang bersifat temporer untuk meredam eskalasi [7]. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi adaptif yang berkelanjutan dalam konteks suksesi keraton di era kontemporer.

Wafatnya Pakubuwana XIII pada akhir tahun 2025 kembali memicu sengketa suksesi dengan klaim ganda atas tahta [12]. Secara sosiologis, konflik ini menarik karena merepresentasikan ketegangan dialektis antara institusi tradisional dan tuntutan sistem hukum modern [13]. Di satu sisi, klaim tahta berbasis warisan kultural dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap rasionalitas hukum formal yang dianggap mengikis otonomi simbolik keraton. Di sisi lain, ketidakmampuan menghasilkan mekanisme suksesi yang transparan mengindikasikan kegagalan adaptasi institusi tradisional terhadap tuntutan akuntabilitas publik [5]. Jika konflik dibiarkan berlarut, masyarakat berpotensi kehilangan ruang simbol yang selama ini menjadi pemersatu identitas Jawa.

Kondisi tersebut menuntut kajian mendalam tentang strategi penyelesaian yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial dan resolusi konflik masyarakat adat [8]. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi celah teoretis dengan menganalisis potensi aktualisasi kearifan lokal sebagai strategi rekonsiliasi yang adaptif. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipilih untuk menggali makna dan proses sosial secara mendalam [1]. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kearifan lokal dapat diaktualisasikan untuk menyelesaikan konflik suksesi di Kraton Surakarta secara berkelanjutan dalam konteks ketegangan antara legitimasi kultural dan modernitas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Menurut Assyakurrohim, dkk. (2022) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengeksplorasi suatu fenomena dengan menggambarkan data dan fakta melalui penggunaan kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian [2]. Sedangkan studi kepustakaan sebagaimana didefinisikan oleh Miqzakon & Purwoko adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya [2].

Dalam penelitian ini, penulis membaca sumber literatur terdahulu, menyusun, dan memformulasikan ke dalam instrumen penelitian. Penulis mengidentifikasi akar konflik suksesi Kraton Surakarta, kemudian menganalisis dinamika relasi kekuasaan, polarisasi klaim tahta, serta relevansi prinsip-prinsip kultural Jawa seperti musyawarah, penghormatan kepada sesepuh, dan nilai rukun dalam konteks kontemporer. Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi penyelesaian yang mengintegrasikan dialog internal keluarga kraton dengan peran mediator pihak ketiga, sehingga menghasilkan model resolusi berbasis kearifan lokal yang kontekstual, legitimatif, dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang Konflik

Menurut Ralf Dahrendorf konflik merupakan gejala inheren dalam sistem sosial yang senantiasa dinamis dan rentan terhadap perubahan. Ia menegaskan bahwa keteraturan sosial tidak lahir dari konsensus, melainkan dari koersi yang diterapkan oleh kelompok penguasa, sehingga kekuasaan menjadi instrumen utama dalam mempertahankan stabilitas. Dengan demikian, konflik bukan sekadar ancaman disintegrasi, melainkan juga mekanisme fundamental yang mendorong transformasi struktural dalam masyarakat [5].

Lebih lanjut, Dahrendorf menyebutkan terdapat empat sumber konflik, di antaranya, 1) Adanya status sosial di dalam masyarakat; 2) Adanya benturan kayamiskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh, kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai; 3) Adanya dominasi; 4) Adanya ketidakadilan atau diskriminasi, agama), kekuasaan (penguasa dan dikuasai) [5].

Relevan dengan pendapat tersebut, George Simmel sebagaimana dikutip (Maghfiroh & Zamawi, 2012) konflik merupakan mekanisme interaksi yang inheren dan fungsional dalam menjaga keberlangsungan hubungan sosial, alih-alih sebagai ancaman terhadap persatuan. Ia berargumen bahwa disintegrasi sosial tidak disebabkan oleh adanya pertentangan, melainkan oleh stagnasi atau ketiadaan interaksi antaraktor sosial [6].

Selain itu, George Simmel mengemukakan bahwa konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antar individu maupun kelompok. Namun menurutnya, konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antar individual maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi Simmel, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antar individual maupun kelompok.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Secara terminologis, konflik adalah kondisi atau proses interaksi sosial yang ditandai oleh percekocan, perselisihan, pertentangan, atau ketegangan antara dua pihak atau lebih akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Istilah ini juga dapat merujuk pada elemen dramatik dalam karya fiksi yang menggambarkan pertentangan antarkekuatan atau antartokoh sebagai penggerak alur cerita [4].

Sehingga, konflik dapat dipahami sebagai gejala inheren dalam interaksi sosial yang termanifestasi melalui perselisihan atau pertentangan antarpihak akibat perbedaan status, kepentingan, nilai, dan struktur kekuasaan. Konflik bukanlah fenomena destruktif semata, melainkan mekanisme fungsional yang mencerminkan realitas koersi dalam mempertahankan keteraturan sekaligus menjadi penggerak dinamika relasi sosial. Sebab, yang mengancam kohesi bukanlah adanya pertentangan, melainkan absennya interaksi itu sendiri. Pemahaman ini relevan baik dalam konteks empiris maupun naratif, di mana konflik berperan sebagai elemen fundamental yang mendorong transformasi struktural dan menghidupkan keberlangsungan hubungan sosial.

Kajian tentang Kraton Surakarta dan Konflik Sukseksi 2004-2025

Kraton Surakarta merupakan pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang didirikan pada tahun 1744 oleh Susuhunan Pakubuwono II. Institusi ini menjadi pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat Geger Pacinan (1743) dan awalnya dibangun di Desa Sala yang kemudian berganti nama menjadi Surakarta Hadiningrat. Keraton ini juga menjadi saksi penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram kepada VOC oleh Pakubuwono II pada tahun 1749. Pasca Perjanjian Giyanti (1755), lembaga Kasunanan tetap bertahan hingga status politiknya dihapus pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan wilayahnya resmi dialihkan menjadi Karesidenan di bawah pemerintahan Republik Indonesia [11]. Transformasi historis ini menempatkan Kraton Surakarta pada posisi unik: institusi kultural yang harus bernegosiasi dengan perubahan struktur kekuasaan modern.

Akar konflik suksesi kontemporer berawal sejak meninggalnya Pakubuwana XII pada 11 Juni 2004. Persengketaan antara KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu berbeda dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap paugeran adat dan legitimasi genealogis [2]. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pengganti raja seharusnya adalah anak lelaki tertua dari permaisuri, namun Pakubuwana XII tidak mengangkat seorang permaisuri resmi hingga akhir hayatnya. Ambiguitas normatif ini menciptakan ruang interpretasi yang dimanfaatkan oleh berbagai kubu untuk mengklaim hak tahta. Pasca konflik, keadaan Kraton Surakarta mengalami fragmentasi otoritas yang memengaruhi kohesi internal institusi.

Konflik suksesi antara KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan pada akhirnya berhasil diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga di luar mekanisme paugeran hukum adat keraton [7]. Hasil mediasi tersebut mendudukkan KGPH Hangabehi sebagai raja dengan gelar Pakubuwana XIII, sedangkan KGPH Tedjowulan dinobatkan sebagai mahamenteri dengan gelar Panembahan Agung Tedjowulan. Meskipun kompromi ini berhasil meredam eskalasi dalam jangka pendek, kesepakatan tersebut tidak diikuti oleh kodifikasi

mekanisme suksesi yang jelas, tertulis, dan mengikat untuk generasi berikutnya. Kearifan lokal dalam bentuk mediasi adat terbukti efektif sebagai instrumen pemadam konflik, namun kurang mampu menciptakan kepastian struktural jangka panjang.

Di penghujung tahun 2025, wafatnya Pakubuwana XIII kembali memicu sengketa suksesi dengan pola yang secara struktural mereplikasi konflik tahun 2004. Mengingat peristiwa ini bersifat mutakhir, data empiris yang tersedia masih didominasi oleh pemberitaan media kredibel yang berfungsi sebagai sumber primer untuk memetakan kronologi dan aktor konflik [12]. Klaim ganda atas tahta oleh dua putra raja menunjukkan bahwa resolusi sebelumnya belum menghasilkan konsensus kelembagaan yang berkelanjutan. Pengulangan sengketa ini menegaskan bahwa akar masalah suksesi di Kasunanan bersifat laten dan belum terselesaikan secara tuntas melalui pendekatan yang ada.

Kajian tentang Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib [3]. Sedangkan menurut Ruhana & Furqan (2023) kearifan lokal yaitu pengetahuan atau kebiasaan yang diwariskan secara Turun-temurun dan memiliki nilai-nilai yang menjadi karakteristik masyarakat tertentu. Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat [14]. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Kearifan lokal merupakan produk budaya masyarakat di masa lampau yang secara terus menerus dijadikan sebagai pegangan hidup dan dasar untuk menjalin interaksi antara sesama komunitas pengagung budaya [7]. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sehingga, kearifan lokal dapat dipahami sebagai sistem nilai, pengetahuan, dan tata perilaku yang lahir dari interaksi panjang masyarakat dengan lingkungan alam dan sosialnya. Karakteristik ini bersifat khas karena terbentuk sesuai dengan konteks ruang, waktu, serta budaya masing-masing daerah. Meskipun berakar pada kekhasan setempat, nilai yang terkandung di dalamnya memiliki makna universal yang memadukan dimensi spiritual dan kearifan empiris. Dengan demikian, kearifan lokal layak dijadikan pedoman hidup berkelanjutan untuk memelihara harmoni antara manusia, alam, dan warisan budaya.

Kajian tentang Penyelesaian Konflik Suksesi Kraton Surakarta melalui Pendekatan Kearifan Lokal

Konflik suksesi yang kembali mewarnai dinamika internal Kraton Surakarta tidak dapat dipandang sekadar sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai gejala sosial yang menuntut penyelesaian berbasis nilai-nilai kultural

yang telah mengakar lama. Pendekatan kearifan lokal menawarkan kerangka strategis yang relevan, mengingat prinsip musyawarah, penghormatan pada hierarki adat, dan pencarian harmoni telah lama menjadi fondasi tata kelola sosial masyarakat Jawa. Dalam konteks ini, aktualisasi kearifan lokal diwujudkan melalui dua mekanisme komplementer, yakni penguatan dialog internal di kalangan keluarga kraton dan keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator kultural yang netral. Dalam tulisan ini, artikel menawarkan dua upaya dalam penyelesaian konflik Kraton Surakarta melalui pendekatan kearifan lokal. Kedua upaya tersebut dapat diintegrasikan secara sinergis untuk menghasilkan resolusi yang tidak hanya meredam eskalasi konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi, menjaga kohesi sosial, serta merevitalisasi peran kraton sebagai penjaga peradaban yang tetap adaptif terhadap dinamika zaman.

Pertama, upaya duduk bersama di kalangan internal keluarga kraton. Strategi ini merupakan perwujudan langsung dari prinsip musyawarah mufakat dan rukun yang menjadi inti kearifan lokal Jawa. Dalam perspektif George Simmel, konflik bukan entitas yang merusak, melainkan bentuk interaksi yang diperlukan untuk mencegah stagnasi hubungan sosial. Proses rembug atau rapat keluarga yang melibatkan sesepuh, abdi dalem senior, serta perwakilan cabang keluarga berfungsi sebagai ruang dialog terstruktur untuk mengalihkan ketegangan menjadi negosiasi substantif. Kearifan lokal di sini berperan sebagai filter budaya yang menekankan tata krama, penghormatan pada hierarki adat (paugeran), dan pencarian titik temu yang tidak mengorbankan harmoni kosmis maupun legitimasi spiritual institusi. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa untuk mengesampingkan klaim individual demi kepentingan kolektif kraton. Tanpa internalisasi nilai ikhlas, nrimo, dan tanggung jawab kultural, duduk bersama berisiko menjadi sekadar formalitas yang justru memperdalam polarisasi. Oleh karena itu, proses internal harus diawali dengan penegasan kembali visi bersama Kraton Surakarta sebagai penjaga peradaban, bukan arena perebutan status semata.

Kedua, keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator kultural yang kompeten. Ketika dinamika internal mengalami kebuntuan atau ketidakseimbangan relasi kekuasaan, kehadiran mediator eksternal menjadi pelengkap struktural yang krusial. Merujuk pada teori Ralf Dahrendorf, konflik suksesi sering kali dipicu oleh dominasi, kompetisi status, dan ketidakjelasan legitimasi yang tidak terkelola secara institusional. Pihak ketiga, yang dapat berupa dewan adat, tokoh budaya, akademisi, atau lembaga mediasi yang memahami konteks Jawa, berfungsi sebagai penengah yang memastikan proses penyelesaian tetap objektif, transparan, dan selaras dengan paugeran. Preseden sukses pada tahun 2004 membuktikan bahwa mediasi eksternal mampu meredam eskalasi dengan memfasilitasi kompromi yang menghormati hak adat sekaligus mengakui realitas politik kontemporer. Dalam konteks suksesi 2025 yang lebih kompleks, mediator harus mampu menjembatani dikotomi antara tradisi dan modernitas, misalnya dengan mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, verifikasi klaim berbasis silsilah dan adat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Keberhasilan mediator sangat ditentukan oleh netralitas kultural, pemahaman mendalam tentang filosofi Jawa, serta kemampuan menghindari intervensi yang dapat dianggap mencampuri otoritas spiritual kraton. Mediator tidak menggantikan keputusan internal, melainkan memperkuat kerangka deliberasi agar hasilnya diterima secara luas dan tidak memicu fragmentasi sosial.



Gambar 1. Bagan Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal

Sintesis strategis dan implikasi kultural. Kedua pendekatan ini tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam sebuah model resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang adaptif. Duduk bersama memperkuat legitimasi internal, menjaga kohesi keluarga, dan memastikan bahwa keputusan lahir dari proses yang dihayati secara kultural. Sementara itu, pihak ketiga menyediakan kerangka struktural yang mencegah dominasi sepihak, memastikan akuntabilitas proses, dan menjembatani kepentingan kraton dengan ekspektasi masyarakat luas. Sinergi ini mencerminkan esensi kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan yang bersifat lokal dalam bentuk, namun universal dalam prinsip: mengutamakan harmoni, menghargai proses kolektif, dan menempatkan nilai spiritual sebagai penjaga keseimbangan sosial. Jika diimplementasikan secara konsisten, model ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tahta, tetapi juga merevitalisasi fungsi kraton sebagai institusi budaya yang resilien, sekaligus mengonfirmasi bahwa konflik dapat menjadi momentum transformasi struktural alih-alih ancaman disintegrasi.

Dengan demikian, penyelesaian konflik suksesi Kraton Surakarta melalui pendekatan kearifan lokal menuntut implementasi yang holistik, kontekstual, dan berkelanjutan. Mekanisme internal dan eksternal harus dijalankan secara simultan, didukung oleh komitmen bersama pada nilai rukun, adil, dan bijaksana. Langkah ini akan memperkuat legitimasi kepemimpinan baru, menjaga citra Surakarta sebagai pusat peradaban Jawa, dan menegaskan bahwa tradisi lokal tetap relevan sebagai panduan manajemen konflik yang berwibawa dan memanusiakan.

D. KESIMPULAN

Konflik yang muncul pasca-wafatnya Pakubuwana XII (2004) dan Pakubuwana XIII (2025) mencerminkan ketegangan antara klaim kekuasaan, hierarki adat, dan ekspektasi sosial. Merujuk pada perspektif Dahrendorf dan Simmel, konflik suksesi ini bukan sekadar ancaman disintegrasi, melainkan gejala inheren dalam sistem sosial yang dapat menjadi penggerak transformasi struktural bila dikelola secara konstruktif. Kompleksitas klaim tahta, polarisasi internal keluarga, dan dampaknya terhadap kohesi budaya masyarakat menuntut pendekatan penyelesaian yang kontekstual dan berakar pada nilai lokal.

Penelitian ini menawarkan penyelesaian konflik suksesi Kraton Surakarta yang dapat diaktualisasikan melalui pendekatan kearifan lokal dengan dua mekanisme komplementer. *Pertama*, penguatan dialog internal keluarga kraton berbasis prinsip musyawarah, penghormatan pada sesepuh, dan nilai rukun. *Kedua*, keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator kultural yang netral untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas proses. Sinergi kedua pendekatan ini menghasilkan model resolusi yang legitimatif, adaptif, dan berkelanjutan,

sehingga konflik tidak hanya teredam, tetapi juga memperkuat peran kraton sebagai penjaga peradaban Jawa yang tetap relevan di tengah dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani. (2022). "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3 (1), 1–9. <https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>
- [2] Bambang, S. (2011). *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS
- [3] Jupri, A. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*. Mataram: LPPM Unram Press, <https://eprints.unram.ac.id/31695/1/COVER%20BUKU%20kearifan%20Lokal%20%28Full%20buku%29.pdf>
- [4] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- [5] Kasim & Nurdin. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Unimal Press, <https://repository.unimal.ac.id/459/1/Sosiologi%20Konflik.pdf>
- [6] Maghfiroh & Zawawi. (2012). Konflik Sosial dalam Novel Aib dan Nasib Karya Minanto Berdasarkan Perspektif George Simmel. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(1), 173–97
- [7] Mulyanto & Widada. (2014). Mediasi Konflik Kraton Surakarta melalui Penerapan Local Wisdom. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2), <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/66>
- [8] Nurlidiawati & Ramadayanti. (2021). Peranan Kearifan lokal (local wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang). *Al-Hikmah*, 23 (1), https://journal.uin-alaudhin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/download/21726/pdf/60760
- [9] Praiswari & Arsandi. (2021). Akulturasi Budaya di Kawasan Kauman Surakarta. *Jurnal Arsir*, edisi khusus, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/arsir/article/view/3647/2471>
- [10] Sari, dkk. (2021). Pemaknaan Konsep Narimo ing Pandum dalam Kehidupan Abdi Dalem Kraton Kasunanan Surakarta. *Jurnal Candi*, 21 (2), <https://www.scribd.com/document/754529169/56888-153039-1-PB>
- [11] Samroni, dkk. (2010). *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ditinjau dari perspektif Historis, Sosiologis dan Filosofis Yuridis*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
- [12] Redaktur III. (2025). Dua Raja Kembali Warnai Keraton Surakarta. *Aktual.co.id*, <https://aktual.co.id/2025/11/14/dua-raja-kembali-mewarnai-konflik-keraton-surakarta/>
- [13] Ritzer G & Goodman. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- [14] Ruhana & Furqan. (2023). Nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Tradisional Rungkoh di Gampong Kuto Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 1, <https://jurnal.usk.ac.id/JPG/article/download/32728/18542>
- [15] Tempo. (2025). Kronologi Perebutan Tahta Raja Kraton Surakarta Setelah Pakubuwana XII Wafat. *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-perebutan-takhta-raja-keraton-surakarta-setelah-pakubuwono-xiii-wafat-2090039>